

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abd. Rahim Lubis, Yamin Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*,
(Bandung: CV. Mandar maju).

Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata
di Pengadilan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011).

Chomzah, Ali, Achmad, *Hukum pertanahan Seri Hukum
Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum
Pertanahan II-Sertipikat Dan Permasalahannya*, (Jakarta:
Prestasi Pustaka, 2002).

Harsono, Boedi, *Undang – Undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan,
Isi, dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Jambatan, 2008).

Murad, Rusmadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung:
Alumni, 1991).

Nasoetion, Lutfi I, *Konflik Pertanahan Agraria Menuju Keadilan Agraria*,
(Bandung: Yayasan AKATIGA, 2002).

Sutedi, Andrian, *Sertifikat Hak atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2007)

Tim Pedoman Buku Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Buku
Pedoman Fakultas Hukum Edisi Revisi 2011*, (Semarang:
Universitas Diponegoro, 2011).

Wiradi, Gunawan, *Masalah Pembaruan Agraria: Dampak Land Reform terhadap Perekonomian Negara 2*, (Jakarta: Tinta Creativ Production, 2011)

B. Makalah, Artikel dan/atau Jurnal

Dicky F.W Kurniawan, *Tugas Dan Fungsi Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Bersertipikat Ganda Dan Overlapping Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Bantul*, Jurnal, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017)

Aprilia Wulandari, *Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertipikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo*, Skripsi, (Surakarta : Universitas Muhamamdyah Surakarta, 2018).

Darwis Anatami, *Tanggung Jawab Siapa Apabila Terjadi Sertipikat Ganda*, Jurnal, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017, (Aceh ; Universitas Samudra, 2017)

Rizki Riolita, *Analisis Yuridis Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertipikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kota Semarang*, ICJLS, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016)

Mulyadi Satino, *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertipikat Ganda*, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 1, Juni 2019 : 147 – 173, (Jakarta : Universitas Pembangunan Nasional, 2019).

Sony Kurniawan, *Analisis Yuridis Pembatalan Akas Hak Atas Tanah Yang Tumpang Tindih (Overlapping) Di Kabupaten Tapanuli Tengah (Studi Putusan Mahkamah Agung nomor 652/K/PDT/2016)*, (Medan : Universitas Sumatra Utara, 2011)

Harlina Ratna Sambawa Ningrum, *Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan*, Jurnal, Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014, (Semarang, 2014).

Margaretha Kirana, S.H, *Sertipikat Ganda Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 156/K/TUN/2015*, Tesis, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2012).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan;

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
8

Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria / Kepala
Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun
1999 tentang Cara Penanganan Sengketa Pertanahan

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan
Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus
Pertanahan